

**ANALISIS FAKTOR PENENTU UPAH MINIMUM DI  
KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2009–2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis**

**Oleh:**

**SEPTA DWI WULANDARI**

**B300160196**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS FAKTOR PENENTU UPAH MINIMUM DI  
KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2009–2018**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SEPTA DWI WULANDARI**

**B300160196**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Muhammad Anas, S.E., M.Si.**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR PENENTU UPAH MINIMUM DI  
KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2009–2018

OLEH

SEPTA DWI WULANDARI

B300160196

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 25 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muhammad Anas, S.E., M.Si.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Siti Aisyah, S.E., M.Si.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Siti Fatimah Nurhayati, S.E., M.Si .  
(Anggota II Dewan Penguji)

(Anas)  
(Aisyah)  
(Fatimah)



Dekan,

Drs. H. Samsudin, M.M.  
NIDN. 0017025701

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Januari 2021

Penulis



**SEPTA DWI WULANDARI**

**B300160196**

# ANALISIS FAKTOR PENENTU UPAH MINIMUM DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2009–2018

## Abstrak

Upah minimum di Karesidenan Surakarta selalu meningkat selama kurun waktu 2008–2018, namun kenaikannya cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten setiap tahun. Fluktuasi tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008–2018, dengan menggunakan analisis regresi data panel fixed effect model (FEM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum, dan PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum. Sementara itu, inflasi ditemukan tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Bagi masing-masing pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta, kebijakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan aspirasi perusahaan dan pekerja karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.

**Kata Kunci:** upah minimum, inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB, regresi data panel

## Abstract

The minimum wage in the Surakarta Residence always increased during the period of 2008–2018, however the value of the increase tended to fluctuate and inconsistently every year. This fluctuation is due to the economic and labor market conditions in the Surakarta Residence. The research aimed to estimate the effect of inflation rate, employment rate, and GRDP on the minimum wage in Surakarta Residence during the period of 2008–2018 using a fixed effect panel data regression model. The result of this study showed that employment rate had a negative effect on the minimum wage, and GRDP had a positive effect on the minimum wage. For the regional government in the Surakarta Residence, the policy for determining the minimum wage must pay attention to the aspirations of companies and workers because it is related to business continuity and worker welfare.

**Keywords:** minimum wage, inflation rate, employment rate, GRDP, panel data regression analysis

## 1. PENDAHULUAN

Upah minimum adalah permasalahan yang pelik karena mengharuskan pembuat kebijakan untuk mencari keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Perdebatan mengenai kebijakan upah minimum tidak berbeda jauh dengan perdebatan

mengenai peraturan perekrutan dan pemberhentian pekerja. Serikat pekerja berpendapat bahwa pembuat kebijakan semestinya memanfaatkan upah minimum sebagai sarana untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kesejahteraan pekerja di sektor formal. Sementara itu, prioritas utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang kemungkinan akan turun jika biaya tenaga kerja meningkat. Dalam hal ini, pembuat kebijakan perlu memperhatikan bagaimana upah minimum mempengaruhi keadilan dan efisiensi bagi semua orang.

Berdasarkan Laporan Lapangan Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Dunia (2010), efisiensi akan menjadi permasalahan penting jika kenaikan upah minimum mendorong upah pekerja jauh di atas harga pasar sehingga perusahaan bereaksi dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja. Hal ini tak hanya mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi juga merugikan pekerja tanpa keahlian dan pekerja informal karena menambah lagi hambatan bagi mereka untuk memasuki sektor formal. Pemerintah menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja sektor informal dan karyawan yang menerima gaji, dan sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Efek upah minimum yang lebih tinggi terhadap keadilan dan efisiensi di Indonesia belum sepenuhnya dipahami. Pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kenaikan upah minimum mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan dan jenis rumah tangga yang diuntungkan oleh kenaikan upah minimum, dapat membantu pembuat keputusan dalam mencari keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Cukup banyak penelitian telah dilakukan mengenai efek upah minimum di Indonesia. Tetapi, berbagai penelitian tersebut menggunakan sumber daya dan pendekatan metodologi yang berbeda-beda.

Charysa (2013) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu penetapan upah minimum regional yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak. Beberapa daerah yang terletak di Karesidenan Surakarta, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta juga

menganut penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak masing-masing daerah.

Rata-rata inflasi di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,77 persen dan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,32 persen. Tingginya inflasi mengindikasikan bahwa harga kebutuhan hidup layak masyarakat di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan. Kenaikan inflasi akan mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi agar kebutuhan hidup layak masyarakat terpenuhi. Namun, bagi perusahaan kenaikan inflasi akan memberikan dampak negatif karena biaya produksi yang semakin tinggi baik dari segi biaya tenaga kerja maupun biaya bahan baku.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi upah minimum adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. BPS (2020) mendefinisikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja berarti kenaikan penawaran tenaga kerja. Agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran, kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja akan direspon pemerintah dengan menurunkan upah minimum yang ditetapkan. Dengan demikian, beban produksi perusahaan akan berkurang dan pengangguran juga akan berkurang (Armidi, Erfit, dan Yulmardi, 2018).

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 2008-2018, dengan peningkatan tertinggi sebesar 1,684 persen pada tahun 2012 dan penurunan terbesar sebesar 1,363 pada tahun 2014. Naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja menandakan jumlah angkatan kerja di Karesidenan Surakarta juga mengalami peningkatan. Apabila kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah lapangan usaha, maka jumlah pengangguran di Karesidenan Surakarta juga akan meningkat. Hal ini akan membuat pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih rendah agar angkatan kerja dapat terserap oleh perusahaan.

Selain dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum juga dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2020), PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Tingginya nilai PDRB di suatu wilayah menandakan tingginya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, baik dari sisi produksi ataupun konsumsi. Dengan demikian, pemerintah akan menetapkan upah minimum yang lebih tinggi karena aktivitas ekonomi di wilayah tersebut juga semakin tinggi (Nurtiyas, 2016).

Selama kurun waktu 2009-2018 rata-rata PDRB di Karesidenan Surakarta terus mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhannya cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Kenaikan PDRB di Karesidenan Surakarta tersebut sejalan dengan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Sementara itu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta memperlihatkan aktivitas ekonomi yang kurang bergairah sehinggapeningkatan upah minimum juga cenderung melambat.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, disimpulkan bahwa upah minimum merupakan indikator ketenagakerjaan yang sangat penting karena menyangkut keadilan bagi pekerja dan efisiensi bagi perusahaan. Peningkatan upah minimum di Karesidenan Surakarta cenderung melambat selama kurun waktu 2008-2018. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang juga melambat selama kurun waktu 2008-2018. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah penelitian sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa data panel, yaitu kombinasi dari data *cross-section* dan data *time series*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa regresi data panel dengan model ekonometrika dengan persamaan:



$$UMR_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + u_{it} \quad (1)$$

Dimana:

UMR	=	Upah Minimum Regional
INF	=	Inflasi
TPAK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
$\beta_0$	=	konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	koefisien regresi variabel independen
i	=	kabupaten/kota ke i
t	=	tahun ke t
u	=	unsur kesalahan ( <i>error term</i> )

### 3. HASIL

#### 3.1 Perkembangan Upah Minimum

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata upah minimum di Karesidenan Surakarta terus meningkat selama kurun waktu 2008-2018, dengan peningkatan tertinggi sebesar 0,20 juta Rupiah pada tahun 2016 dan peningkatan terendah sebesar 0,04 juta Rupiah pada tahun 2011. Kenaikan upah minimum mencerminkan kenaikan kebutuhan hidup layak. Bagi pekerja, kenaikan upah minimum merupakan kenaikan pendapatan, sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Namun, bagi pengusaha kenaikan upah minimum merupakan kenaikan biaya produksi yang menyebabkan laba perusahaan berkurang. Dengan demikian, pengusaha akan mengurangi biaya produksi dengan mengurangi jumlah pekerja yang digunakan. Pengurangan jumlah pekerja akan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat.

#### 3.2 Perkembangan Inflasi

Kenaikan inflasi yang tinggi seperti pada tahun 2013 menyebabkan daya beli masyarakat di Karesidenan Surakarta menjadi menurun. Penurunan daya beli tersebut menyebabkan kebutuhan hidup layak di Karesidenan Surakarta menjadi meningkat. Kenaikan kebutuhan hidup layak akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upah minimum. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan mampu hidup secara sejahtera.

### 3.3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 1,68 persen dan terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,29 persen. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut berarti kenaikan penawaran tenaga kerja. Apabila kenaikan penawaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan, maka akan timbul pengangguran. Hal ini akan mendorong pemerintah untuk menetapkan upah minimum yang lebih rendah agar angkatan kerja mampu terserap oleh pasar kerja dan pengangguran akan berkurang.

### 3.4 Perkembangan PDRB

Berdasarkan hasil terlihat bahwa PDRB di Karesidenan Surakarta terus meningkat selama kurun waktu 2008-2018, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,05 triliun rupiah per tahun. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, cenderung mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2008-2018. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan walaupun aktivitas ekonomi terus berajalan namun kinerjanya tidak stabil. Ketidakstabilan ini akan berdampak pada pasar tenaga kerja yang juga tidak stabil. Dengan demikian, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah-pun juga tidak stabil karena menyeimbangkan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja.

### 3.5 Hasil Analisis

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Cross-Section*

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	-1,369	0,427	-0,800
INF	-0,022	-0,006	-0,015
TPAK	0,019	-0,016	0,007
PDRB	0,058	0,089	0,073
R <sup>2</sup>	0,650	0,946	0,790
Adj. R <sup>2</sup>	0,634	0,938	0,780
F-statistik	40,891	116,793	82,594
Prob. F-statistik	0,000	0,000	0,000

3.5.1 Pe

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54,781	(6, 60)	0,000

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa probabilitas F-statistik uji Chow bernilai sebesar 0,000 (< 0,01), sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, model terbaik berdasarkan pendekatan Fixed Effects Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Square Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	168,480	3	0,000

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa probabilitas  $\chi^2$ -statistik uji Hausman bernilai sebesar 0,000 (< 0,01), sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, model terbaik berdasarkan pendekatan Fixed Effects Model (FEM).

Tabel 4. Hasil Estimasi Data Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

$\widehat{UMN}_{it}$	=	0,427	-	0,006	$INF_{it}$	-	0,016	$TPAK_{it}$	+	0,089	$PDRB_{it}$
		(0,297)		(0,116)			(0,006)*			(0,000)*	
$R^2 = 0,946$ ; D-W.stat. = 0,713; F-stat. = 116,793; Prob.F-stat. = 0,000											

Tabel 5. Hasil Perhitungan Konstanta *Fixed Effect Model (FEM)*

Daerah	Efek	Konstanta
Kabupaten Boyolali	0,332	0,759
Kabupaten Klaten	-0,121	0,306
Kabupaten Sukoharjo	-0,018	0,409
Kabupaten Wonogiri	0,297	0,724
Kabupaten Karanganyar	0,046	0,472
Kabupaten Sragen	0,005	0,432
Kota Surakarta	-0,542	-0,115

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Boyolali, yaitu sebesar 0,759. Hal ini berarti terkait pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum, Kabupaten Boyolali cenderung memiliki upah minimum yang tertinggi di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. Sementara itu, nilai konstanta terendah dimiliki oleh Kota Surakarta, yaitu sebesar -0,115. Hal ini berarti terkait pengaruh inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB terhadap upah minimum, Kota Surakarta cenderung memiliki upah minimum yang terendah di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

### 3.5.2 Uji Signifikan Parsial

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Parsial

Variabel	Probabilitas t-Statistik	Kriteria	Kesimpulan
INF	0,116	$> 0,10$	Tidak berpengaruh signifikan
TPAK	0,006	$< 0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
PDRB	0,000	$< 0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat bahwa probabilitas nilai t-statistik untuk variabel inflasi sebesar 0,116 ( $> 0,10$ ), sehingga  $H_0$  tidak ditolak atau inflasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Sementara itu, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB masing-masing memiliki probabilitas nilai t-statistik sebesar 0,006 ( $< 0,01$ ) dan 0,000 ( $< 0,01$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum.

### 3.5.3 Uji Signifikan Simultan

Tabel 4. memperlihatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 ( $< 0,01$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak. Kesimpulannya, model yang dipakai eksis atau secara bersama-sama inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB berpengaruh terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018.

### 3.5.4 Interpretasi Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa koefisien determinasi bernilai sebesar 0,946  $\approx 0,95$ , dengan demikian 95 persen variasi perubahan upah minimum dapat dijelaskan oleh variasi perubahan inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB. Sisanya, yaitu sebesar 5 persen dijelaskan oleh variasi perubahan variabel lain di luar model.

### 3.5.5 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang ditampilkan pada Tabel 4.6, tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB terbukti berpengaruh signifikan terhadap upah minimum, sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum.

Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,016. Pola hubungan antara upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah linier-linier, sehingga apabila tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 1 persen maka upah minimum akan turun sebesar 16 ribu Rupiah.

Variabel PDRB memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,089. Pola hubungan antara upah minimum dan PDRB adalah linier-linier, sehingga apabila PDRB naik sebesar 1 triliun Rupiah maka upah minimum akan naik sebesar 89 ribu Rupiah.

### 3.6 Interpretasi Ekonom

#### 3.6.1 Inflasi

Tabel 7. Inflasi dan Upah Minimum di Karesidenan Surakarta Tahun 2009-2018

Tahun	Inflasi (Persen)		Upah Minimum (Rupiah)	
	Nominal	Kenaikan	Nominal	Kenaikan
2009	2,320	-7,449	698.929	72.029
2010	7,036	4,716	745.357	46.429
2011	2,679	-4,357	782.111	36.753
2012	3,521	0,843	826.636	44.525
2013	8,246	4,724	890.429	63.793
2014	7,749	-0,497	1.062.371	171.943
2015	2,569	-5,180	1.177.886	115.514
2016	2,401	-0,167	1.375.786	197.900
2017	3,050	0,649	1.497.051	121.266
2018	2,420	-0,630	1.630.639	133.588

Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa inflasi di Karesidenan Surakarta cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, di mana kenaikan atau penurunannya menunjukkan nilai yang cukup ekstrim. Sementara itu, dari sisi upah minimum, setiap tahunnya nilai upah minimum mengalami kenaikan, tetapi perubahannya setiap tahunnya tidak terlalu ekstrim. Apabila dikaitkan dengan teori pengaruh inflasi terhadap upah minimum, kenaikan inflasi akan meningkatkan upah minimum atau sebaliknya penurunan inflasi akan menyebabkan upah minimum juga menurun. Namun apabila dilihat berdasarkan data pada Tabel 7, teori tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di Karesidenan Surakarta. Sebagai contoh, pada tahun 2010 nilai inflasi mengalami kenaikan dari 2.32 persen menjadi 7.04 persen dan upah minimum juga mengalami kenaikan dari 698,929 rupiah menjadi

745,357 rupiah. Namun pada tahun 2011, penurunan inflasi dari 7.04 persen menjadi 2.68 persen justru menyebabkan upah minimum mengalami kenaikan dari 745,357 rupiah menjadi 782,111 rupiah.

### 3.6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil uji signifikansi parsial membuktikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. Artinya, kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan upah minimum di Karesidenan Surakarta turun.

Hal ini berarti hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian. Pengaruh negatif tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum disebabkan karena kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan kenaikan penawaran tenaga kerja. Apabila kenaikan penawaran tenaga kerja tersebut tidak diiringi dengan kenaikan permintaan tenaga kerja, maka akan timbul pengangguran. Pengangguran secara ekonomi akan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan menurunnya pengeluaran dan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah akan merespon kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menurunkan upah minimum. Hal ini dilakukan agar kenaikan jumlah angkatan kerja dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.

### 3.6.3 Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, terbukti bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2008-2018. Hal ini berarti meningkatnya PDRB akan menyebabkan upah minimum di Karesidenan Surakarta juga meningkat.

Pengaruh positif PDRB terhadap upah minimum disebabkan karena kenaikan PDRB merupakan kenaikan aktivitas ekonomi, baik dari sisi permintaan ataupun penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan PDRB merupakan kenaikan aktivitas produksi perusahaan. Kenaikan aktivitas produksi ini mengindikasikan dua hal, pertama kinerja perusahaan meningkat atau kedua terjadi penambahan lapangan pekerjaan baru. Kedua hal tersebut sama-sama akan meningkatkan upah

minimum karena jumlah tenaga kerja yang terserap akibat kenaikan aktivitas produksi tersebut juga semakin banyak.

#### **4. PENUTUP**

Upah merupakan variabel ekonomi yang mempunyai kedudukan strategis bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bagi pekerja upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu sumber biaya yang dapat mempengaruhi biaya produksi total dan harga output. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tingkat upah dengan kebutuhan hidup minimum pekerja dan kemajuan perusahaan perlu terus diupayakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh inflasi, PDRB, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap upah minimum regional di Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 2009-2018.

Hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) memperlihatkan bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap upah minimum regional di Karesidenan Pati selama kurun waktu 2009-2018 adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB. PDRB berpengaruh positif terhadap upah minimum, yang artinya apabila PDRB meningkat maka upah minimum juga akan meningkat. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap upah minimum, yang artinya apabila tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat maka upah minimum akan menurun. Variabel inflasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum, yang artinya peningkatan inflasi tidak akan memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap upah minimum. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah di Karesidenan Surakarta yang selalu menjaga kestabilan keduanya, yaitu inflasi yang rendah dan tingkat upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah masing-masing daerah di Karesidenan Surakarta terkait upah minimum harus memperhatikan dua pihak, yaitu pekerja

dan pengusaha. Bagi pekerja, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah harus mampu melindungi kesejahteraan pekerja atau setidaknya dengan upah minimum tersebut pekerja mampu mencukupi kebutuhan hidup layak baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarga. Bagi pengusaha, upah minimum yang ditetapkan pemerintah diharapkan tidak terlalu menjadi beban bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, apabila upah yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha, maka kenaikan upah akan menjadi tambahan beban produksi, sehingga pada akhirnya perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Selain itu, pemerintah juga harus terus mendorong aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi maupun konsumsi agar upah yang ditetapkan mampu mengikuti keadaan perekonomian terbaru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armidi, Erfit, & Yulmardi. (2018). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, 07(01), 33-42. Retrieved from <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/JSEL/article/view/4654>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data: Third Edition*. West Sussex England: John Wiley & Son Ltd. Retrieved from [https://himayatullah.weebly.com/uploads/5/3/4/0/53400977/baltagi-econometric-analysis-of-panel-data\\_himmy.pdf](https://himayatullah.weebly.com/uploads/5/3/4/0/53400977/baltagi-econometric-analysis-of-panel-data_himmy.pdf)
- Bank Dunia. (2010). *Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia: Menuju terciptanya pekerjaan yang lebih baik dan jaminan perlindungan bagi para pekerja*. Jakarta: Bank Dunia. Retrieved from <http://documents1.worldbank.org/curated/en/180971468040514780/pdf/563480WP0Indon110Full0version0FINAL.pdf>
- Basuki, A. T. (2019). *Buku Praktikum Eviews Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Yogyakarta: Danisa Media. Retrieved from <https://ekonometrikblog.files.wordpress.com/2019/09/buku-pratikum-eviews-mm-umy.pdf>
- Bersales, L. G., & Lucagbo, M. D. (2014). Determinants of Regional Minimum Wages. *The Philippine Statistician*, 63(02), 71-85. Retrieved from [https://www.psai.ph/tps\\_details.php?id=62](https://www.psai.ph/tps_details.php?id=62)



- BI. (2015). Metadata PDRB. Jakarta: Departemen Statistik Bank Indonesia. Retrieved from [https://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sekda/Documents/Produk\\_Domestik\\_Regional\\_Bruto\\_\(PDRB\)\\_rev160615.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sekda/Documents/Produk_Domestik_Regional_Bruto_(PDRB)_rev160615.pdf)
- Blais, A., Cousineau, J.-M., & McRoberts, K. (1989). The Determinants of Minimum Wage Rates. *Public Choice - Kluwer Academic Publishers*, 62, 15-24. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/316674287\\_The\\_determinants\\_of\\_minimum\\_wage\\_rates](https://www.researchgate.net/publication/316674287_The_determinants_of_minimum_wage_rates)
- Boediono. (2000). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM. BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 04(02), 277-285. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/2489>
- Dreger, C. (2019). Determining Minimum Wages in China: Do Economic Factors Dominate? *Review of Urban & Regional Development Studies*, 1-16. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rurd.12094>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10): Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric: Fifth Edition*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin. Retrieved from <http://213.230.96.51:8090/files/ebooks/Ekonometrika/Gujarati%20d%20porter%20d%20basic%20econometrics.pdf>
- Insukindro. (1998). Sindrum R<sup>2</sup> dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13(04), 1-18. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39396>
- Kertiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional di Provinsi Bali pada Tahun 2008-2015. *E-Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 09(01), 1-10. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/19999>
- Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers. Retrieved from <http://imas.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/63058/Ebook+Macro+Ekonomi+N.+Gregory+Mankiw.pdf>

- Merdekawaty, R., Ispriyanti, D., & Sugito. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). *Jurnal Gaussian*, 05(03), 525-534. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/14709>
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 05(02), 166-175. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/view/3995/3676>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan Nomor 13. Jakarta: Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan Nomor 78. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015>
- Utomo, Y. P. (2012). *Buku Praktek Komputer Statistik II (EViews)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wibowo, A. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016. Naskah Publikasi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1-13. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/63013/>
- Zahari. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 14(03), 1-7. Retrieved from <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/256>